

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG AKTIVITAS
NELAYAN DI LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

NURAINUN MAGFIRAH

D101171008



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG AKTIVITAS
NELAYAN DI LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

NURAINUN MAGFIRAH

D10117008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Pada tanggal 21 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr-Ing. Ir. Muh. Yamin Jinca, MS.Tr


Dr-techn. Yashir K.D Sutopo, ST.,MIP

NIP. 19531221 198103 1 002

NIP. 19790117 200112 2 002

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin


Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si

NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurainun Magfirah
NIM : D101171008
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pengembangan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Nelayan di Lappa Kecamatan Sinjai Utara

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 20 April 2022

Yang menyatakan



Nurainun Magfirah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata terindah selain mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Pengembangan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Nelayan di Lappa Kecamatan Sinjai Utara”**. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Adapun tugas akhir ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Kecamatan Sinjai Utara memiliki potensi pemberdayaan hasil alam perikanan dan kelautan. Namun, potensi yang dimilikinya dalam usaha pemanfaatan belum optimal. Sehingga, pengambilan topik penelitian ini didasari oleh ketertarikan dan keresahan penulis terhadap potensi produksi hasil perikanan di Kabupaten Sinjai tersebut yang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan khususnya di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara.

Tugas akhir ini membahas mengenai prasarana dan sarana penunjang aktivitas nelayan menurut standar yang berlaku, serta bagaimana ketersediaannya dan strategi dalam pengembangan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan tersebut. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur khususnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Lappa.

Adapun hal menarik dalam tugas akhir ini yaitu data yang disajikan mengenai strategi ditinjau dari beberapa aspek bukan hanya terkait infrastruktur penunjang saja, tetapi juga membahas dari aspek sosial, potensi produksi, dan alur distribusi pemasaran.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk karya yang lebih baik kedepannya. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 April 2022



(Nurainun Magfirah)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut.

Magfirah, Nurainun. 2022. *Pengembangan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Nelayan di Lappa Kecamatan Sinjai Utara*. Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: nurainunmagfirah27@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad *Shallallahu a'laihi wasallam* yang berbudi pekerti luhur dan mulia nasabnya dengan semulia-mulia doa dan ucapan baginya. Selayaknya manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang (Bapak Abdul Asis S.Pd dan Ibu Rosdianah S.Pd.) atas cinta, doa, nasihat, waktu, pengorbanan, ilmu, dukungan dan segalanya yang dilimpahkan tiada hentinya kepada penulis;
2. Saudara-saudara tercinta (Almuarif Radiansah, Almuqsitu Radiah, Sukadri, Hasriani, Tien Evita Wulantami, Nurul Mawaddah Syafitri, dan Syahria Mauliani) atas doa, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, dukungan kepada penulis;
3. Keluarga besar Abd.Asis dan Rosdianah atas doa, bantuan moril dan materi yang dicurahkan kepada penulis hingga saat ini;
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas bantuan moril selama masa perkuliahan mulai semester 3 hingga saat ini melalui program beasiswa unggulan kemendikbud masyarakat berprestasi;
5. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ph. D) atas kebijakan dan ijin penelitian yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT) atas dukungan, motivasi, dan ijin penelitian yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan dalam penyusunan tugas akhir;
7. Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST, M.Si.)

atas kebijakan, nasihat, kasih sayang dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan kepada penulis;

8. Dosen Penasihat Akademik (Bapak Dr. Eng. Ihsan, ST. MT) atas segala nasihat, bantuan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Dosen Pembimbing Utama (Bapak Prof. Ing. M. Yamin Jinca, MStr) atas ilmu, motivasi, waktu, tenaga dan khususnya untuk nilai kedisiplinan dan keramahan hati yang beliau ajarkan;
10. Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Kepala Studio Akhir (Ibu Dr-techn. Yashinta K.D. Sutopo, ST., MIP) atas bekal ilmu, waktu, motivasi, tenaga dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis;
11. Dosen Penguji 1 (Ibu Sri Aliah Ekawati ST., MT) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Dosen Penguji 2 (Ibu Dr-Ing. Venny Veronica Natalia, ST., MT) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin atas ilmu, bimbingan dan waktu yang diberikan kepada penulis;
14. Seluruh staf administrasi dan pelayanan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, khususnya Bapak Haerul Muayyar, S.Sos yang senantiasa dengan kemurahan hatinya, kesabaran, dan kebaikan membantu penulis dalam kelengkapan administrasi dari awal perkuliahan hingga saat ini;
15. Sahabat sekaligus saudara sehidup Rumah Hijau Squad (Rifdah Irfan, Sandra Sarika, Shohifah Shaf) atas segala kebersamaan, kasih sayang, dukungan, pengalaman, bantuan, motivasi kepada penulis selama ini.
16. Sahabat tercinta (Fidyah Aristanti Saleh, Annisya Alivfia Soehartono, Andi Azzam) atas segala dukungan, bantuan, nasihat serta motivasi selama ini kepada penulis.

17. Teman-teman SPASIAL 2017 atas ilmu, kebahagiaan, pengalaman, kasih sayang, dan kebersamaan yang diukir selama empat tahun;
18. Kakak-kakak RADIUS 2016 dan ZONASI 2015 atas ilmu, bantuan, dukungan, pengalaman yang diberikan kepada penulis.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan;

Penulis menyadari ucapan terima kasih takkan mampu membalas kebaikan dan keikhlasan hati pihak-pihak terkait. Hanya untaian doa dapat dihaturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlimpat ganda atas segala bantuan. Penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan menjadi lebih baik dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Makassar, 21 April 2022



(Nurainun Magfirah)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR. PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR RUMUS.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengembangan Kawasan.....	6
2.2 Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	9
2.3 Kampung Nelayan.....	9
2.4 Kawasan Minapolitan.....	13
2.5 Kebijakan-kebijakan.....	31
2.6 Penelitian Terdahulu.....	34
2.7 Kerangka Pikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
3.2 Kebutuhan Data (Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan).....	42
3.3 Teknik Analisis.....	45
3.3.1 Analisis Sintesis Literatur.....	45
3.3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk.....	45
3.3.3 Analisis Tingkat Ketersediaan.....	45
3.3.4 Analisis Deskriptif dan Spasial.....	47
3.3.5 Analisis SWOT.....	48
3.4 Kerangka Penelitian.....	50
3.5 Definisi Operasional.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai.....	55
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Lappa.....	60
4.3 Potensi Perikanan.....	65
4.4 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat.....	69
4.5 Sistem Alur Pemasaran/Distribusi Perikanan.....	71
4.6 Kondisi Eksisting.....	77
4.7 Analisis.....	103
4.7.1 Ketersediaan Sarana Penunjang.....	103
4.7.2 Ketersediaan Prasarana Penunjang.....	107
4.8 Strategi Pengembangan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Nelayan di Kelurahan Lappa.....	117
BAB V PENUTUP.....	128
5.1 Simpulan.....	128
5.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	133
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	39
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian.....	41
Gambar 3.2	Model Matrik Analisis SWOT.....	49
Gambar 3.3	Skema Kerangka Penelitian.....	51
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Sinjai.....	57
Gambar 4.2	Peta Orientasi Lokasi Penelitian.....	61
Gambar 4.3	Skema Alur Distribusi Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan....	72
Gambar 4.4	Alur Distribusi Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan Lappa.....	74
Gambar 4.5	Skema Alur Distribusi Pemasaran Hasil Olahan Perikanan....	75
Gambar 4.6	Alur Distribusi Pemasaran Hasil Olahan Perikanan Lappa....	76
Gambar 4.7	Tempat Pelelangan Ikan Sinjai, Lappa.....	78
Gambar 4.8	Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Lappa.....	79
Gambar 4.9	SPDN Lappa.....	80
Gambar 4.10	Tempat Penjemuran Ikan dan Jala di Lappa.....	81
Gambar 4.11	Pabrik Es Amaly, Lappa.....	82
Gambar 4.12	Industri Pengolahan Skala Rumah Tangga.....	83
Gambar 4.13	Industri Pengolahan Perikanan Skala Kecil dan Menengah....	84
Gambar 4.14	Hasil Produksi/Olahan Industri Pengolahan Perikanan Skala Kecil dan Menengah.....	84
Gambar 4.15	Bengkel Kapal Skala Rumah Tangga.....	86
Gambar 4.16	Ruang Pendingin di Industri Pengolahan Skala Kecil dan Menengah.....	87
Gambar 4.17	Peta Eksisting Ketersediaan Sarana Penunjang Aktivitas Nelayan.....	88
Gambar 4.18	Peta Radius Pelayanan Kampung Nelayan Lappa.....	89
Gambar 4.19	Peta Radius Pelayanan Kampung Nelayan Lappa.....	90
Gambar 4.20	Peta Radius Pelayanan Kampung Nelayan Lappa.....	91
Gambar 4.21	Kondisi Eksisting Prasarana Jalan.....	92
Gambar 4.22	Grafik Kondisi Eksisting Prasarana Jalan.....	93
Gambar 4.23	Grafik Lebar Prasarana Jalan.....	93

Gambar 4.24	Grafik Jenis Jalan.....	94
Gambar 4.25	Grafik Kelas Jalan.....	95
Gambar 4.26	Prasarana Dermaga di Lappa.....	98
Gambar 4.27	Peta Eksisting Ketersediaan Prasarana Penunjang Aktivitas Nelayan.....	100
Gambar 4.28	Peta Jaringan Jalan.....	101
Gambar 4.29	Peta Radius Pencapaian Dermaga.....	102
Gambar 4.30	Grafik Kinerja Jalan dari Aspek Lebar Jalan.....	109
Gambar 4.31	Grafik Kinerja Jalan dari Aspek Kontruksi.....	109
Gambar 4.32	Grafik Kinerja Jalan dari Aspek Kelengkapan.....	110
Gambar 4.33	Grafik Kinerja Jalan dari Aspek Status Jalan.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	21
Tabel 2.2	Standar Kebutuhan Air Domestik.....	22
Tabel 2.3	Standar Kebutuhan Air Non Domestik untuk Kota Kategori I, II, III, IV.....	23
Tabel 2.4	Standar Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori V (Desa).....	24
Tabel 2.5	Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori Lain.....	24
Tabel 2.6	Prasarana dan Sarana Penunjang Menurut PERMEN No. 35/ KEPMEN-KP/2013.....	25
Tabel 2.7	Rangkuman Kajian Teori.....	29
Tabel 2.8	Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 2.9	Variabel/Indikator Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1	Kebutuhan Data.....	43
Tabel 3.2	<i>Skoring</i> indikator ketersediaan.....	46
Tabel 3.3	Kriteria Penilaian Jalan.....	52
Tabel 4.1	Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Sinjai.....	55
Tabel 4.2	Penggunaan Lahan Kabupaten Sinjai Tahun 2016.....	58
Tabel 4.3	Rencana Pola Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2016.....	59
Tabel 4.4	Demografi Kabupaten Sinjai.....	60
Tabel 4.5	Tipe Iklim menurut Oldeman.....	63
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk di Kelurahan Lappa Tahun 2015-2019.....	64
Tabel 4.7	Potensi Perikanan dan Kelautan.....	65
Tabel 4.8	Potensi Perikanan Menurut Sektor Perikanan Tahun 2020.....	66
Tabel 4.9	Nilai Produksi Perikanan Menurut Sektor Perikanan Tahun 2016-2020 (Satuan: Rp 1.000).....	66
Tabel 4.10	Volume Produksi Perikanan yang didaratkan di TPI Lappa Tahun 2016-2020 (Satuan: kg).....	67
Tabel 4.11	Jumlah Luas Pemeliharaan Menurut Usaha Budidaya Tahun 2020 (satuan: ha)	68

Tabel 4.12	Data Areal Lahan Budidaya Air Payau Tahun 2020.....	68
Tabel 4.13	Jumlah Tenaga Kerja Perikanan Tahun 2016-2020.....	69
Tabel 4.14	Jumlah Tenaga Pembudidaya Menurut Usaha Budidaya.....	70
Tabel 4.15	Jumlah Nelayan/Tenaga Kerja Perikanan Tangkap.....	70
Tabel 4.16	Jumlah Pelaku Pengolahan Hasil Perikanan.....	85
Tabel 4.17	Ketersediaan dan Pelayanan Listrik di Kelurahan Lappa.....	96
Tabel 4.18	Prasarana Listrik.....	96
Tabel 4.19	Prasarana Air Bersih.....	97
Tabel 4.20	Ketersediaan dan Pelayanan Air Bersih di Kelurahan Lappa.....	97
Tabel 4.21	Pelabuhan Perikanan.....	99
Tabel 4.22	Sarana Pembenihan.....	103
Tabel 4.23	Sarana Pengawetan/Pendinginan.....	103
Tabel 4.24	Sarana Pemasaran.....	105
Tabel 4.25	Skoring Indikator Ketersediaan Sarana Penunjang Aktivitas Nelayan Lappa Berdasarkan Hasil Penelitian.....	105
Tabel 4.26	Produksi Perikanan Laut Komoditi Utama.....	107
Tabel 4.27	Resume LOS Jalan di Kelurahan Lappa.....	108
Tabel 4.28	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kelurahan Lappa Tahun 2019-2042.....	113
Tabel 4.29	Kebutuhan Air Bersih Penduduk Kelurahan Lappa Tahun 2019-2042.....	115
Tabel 4.30	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kelurahan Lappa Tahun 2019-2042.....	116
Tabel 4.31	Jaringan jalan yang direncanakan (pelebaran dan kelengkapan elemen).....	118
Tabel 4.32	Jaringan jalan yang direncanakan (material jalan).....	119
Tabel 4.33	Matriks SWOT.....	122
Tabel 4.34	Faktor Internal.....	125
Tabel 4.35	Faktor Eksternal.....	126

DAFTAR RUMUS

Rumus 1	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	45
Rumus 2	Rumus Index.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kondisi, Jenis, Kelas, dan Panjang Jalan Lappa.....	136
Lampiran 2	Ketersediaan dan Pelayanan Jalan di Lappa.....	138

ABSTRAK

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG AKTIVITAS NELAYAN DI LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA

Nurainun Magfirah¹, Muh. Yamin Jinca², Yashinta K.D Sutopo²

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: nurainunmagfirah27@gmail.com

Kelurahan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, memiliki potensi pemberdayaan hasil alam perikanan dan kelautan. Namun, potensi yang dimilikinya dalam usaha pemanfaatan belum optimal. Beberapa permasalahan yang dijumpai salah satunya ialah infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat nelayan, tingkat kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, belum optimal dilakukan dan belum terealisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan berdasarkan standar dan bagaimana strategi pengembangan infrastruktur lingkungan nelayan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan kecil di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai. Waktu penelitian dilakukan mulai Agustus 2021 hingga Februari 2022 (6 bulan). Lokasi penelitian di Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder diperoleh dari observasi, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yakni analisis sintesis literatur, analisis deskriptif kualitatif, analisis skala linkert, analisis *LOS*, dan analisis *SWOT*. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sarana penunjang aktivitas nelayan di Kelurahan Lappa sebesar 63,6 % dengan kategori sedang dan masih membutuhkan beberapa ketersediaan sarana dan adapun prasarana penunjang aktivitas nelayan masih perlu dilakukan pelebaran jalan dan perencanaan dermaga yang lebih baik, serta pemenuhan kebutuhan untuk prasarana utilitas (listrik dan air bersih).

Kata kunci: Pengembangan, Ketersediaan, Infrastruktur, Aktivitas Nelayan, Lappa

¹Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE SUPPORTING FISHERMAN ACTIVITIES IN LAPPA, SINJAI UTARA

Nurainun Magfirah¹, Muh. Yamin Jinca², Yashinta K.D Sutopo²

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: nurainunmagfirah27@gmail.com

Lappa Village in North Sinjai District, Sinjai Regency, has the potential to empower fisheries and marine natural products. However, its potential in the utilization business is not optimal. Some of the problems encountered, one of which is the infrastructure supporting the activities of the fishing community, the level of welfare and quality of the environment is still low, not optimally carried out and has not been realized properly. This study aims to determine the level of availability of supporting infrastructure for fishing activities based on standards and how the strategy for developing fisherman environment infrastructure is in an effort to improve the economy of small fishing communities in Lappa Village, Sinjai Regency. The time of the study was carried out from August 2021 to February 2022 (6 months). The research location is in Lappa, North Sinjai District, Sinjai Regency, South Sulawesi. The data used are primary and secondary data obtained from observations, interviews and literature studies. Data analysis techniques are literature synthesis analysis, qualitative descriptive analysis, linkert scale analysis, LOS analysis, and SWOT analysis. The results showed that the availability of supporting facilities for fishermen's activities in Lappa Village was 63.6% with the medium category and the infrastructure for supporting fishing activities still needed to be done widening the road and planning a better wharf, as well as meeting the needs for utility infrastructure (electricity and clean water).

Keywords: *Development, Availability, Infrastructure, Fishermen's Activities, Lappa*

¹Student of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University

²Lecture of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perencanaan wilayah terdapat tiga unsur utama yang harus dipertimbangkan, baik itu sebagai masukan maupun sebagai unsur arahan dalam produk rencana yakni penduduk sebagai penghuni yang akan mendapatkan manfaat ataupun dampak dari suatu pembangunan, kegiatan penduduk, maupun ruang bermukim yang nyaman bagi penduduknya. Namun, dari ketiga unsur itu terdapat satu unsur pendukung yang tidak dapat diabaikan dan unsur ini memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk yaitu infrastruktur, kegiatan penduduk tidak akan berjalan baik tanpa didukung oleh ketersediaan pelayanan infrastruktur yang memadai. Kegiatan perekonomian suatu wilayah jika didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan, sehingga akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono, 2006).

Secara umum, infrastruktur merupakan alat penunjang suatu proses dalam upaya yang dilakukan di dalam pelayanan public untuk mencapai keberhasilan. Karena, jika infrastruktur tidak tersedia, maka semua kegiatan yang akan dilakukan tidak akan bisa mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi akan dipacu untuk lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya kelautan. Potensi besar dari perairan dan kawasan pesisir Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian dari sektor kelautan dan perikanan. Namun faktanya, pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam pemenuhan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian lebih dari para pemegang kekuasaan dan kebijakan. Akibatnya, potensi yang dimiliki kelautan Indonesia belum diolah secara maksimal sehingga sektor kelautan masih belum mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan dan kesejahteraan

masyarakat di wilayah pesisir, khususnya para nelayan itu sendiri (Kementrian Pekerjaan Umum bersama Kementrian Pertanian, 2012).

Menurut Baso Arif, dkk (2013) suatu wilayah yang relatif homogen nelayan masyarakatnya menggambarkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan agar aktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bergantung pada sumberdaya perikanan laut tetap berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari suatu kawasan wilayah pesisir. Infrastruktur membentuk struktur ruang, seperti jaringan jalan, sumber air, jaringan listrik, serta jaringan telekomunikasi yang menunjang peningkatan produktivitas hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan. Menurut Dudi Mulyana (2012) dalam Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan Agropolitan dan Minapolitan bahwa ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan para nelayan diharapkan mampu mempercepat pengembangan kawasan, meningkatkan nilai komoditas unggulan perikanan, meningkatkan akses pergerakan orang dari dan menuju kawasan termasuk pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan daya tarik investasi di kawasan minapolitan.

Kelurahan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, memiliki potensi pemberdayaan hasil alam perikanan dan kelautan. Potensi kawasan ini, juga ditunjukkan pada hasil produksi perikanannya yang cukup tinggi tahun 2018 jumlah produksi perikanan laut tangkap di Lappa tercatat sebesar 8.762 ton (BPS dalam angka 2019). Mata pencaharian utama masyarakat di Kelurahan Lappa relatif homogen yaitu sebagai nelayan.

Namun, potensi yang dimilikinya dalam usaha pemanfaatan belum optimal. Beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain; pemanfaatan lahan, infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat nelayan, tingkat kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, belum optimal dilakukan dan belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah bagaimana strategi pengembangan infrastruktur lingkungan nelayan dalam upaya

meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan kecil di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai. Tujuan lainnya adalah diharapkan menjadi informasi dan arahan pertimbangan dalam perencanaan dimasa yang akan datang mengenai pemenuhan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat nelayan yang saling terintegrasi serta memadai dapat mendukung kegiatan perikanan maupun keberadaan wisata, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lappa.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kecamatan Sinjai Utara, nampaknya masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian lebih dari para pemegang kekuasaan dan kebijakan khususnya dalam pemenuhan infrastruktur kegiatan nelayan. Sehingga, kegiatan penduduk yang belum optimal dapat berjalan dengan baik jika didukung infrastruktur yang memadai sehingga mampu meningkatkan perekonomian bagi warga setempat.

Dari uraian permasalahan tersebut diperlukan suatu strategi pengembangan infrastruktur lingkungan nelayan dalam rangka meningkatkan hasil perikanan, dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. Solusi masalah dapat diketahui dengan mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Prasarana dan sarana apa yang diperlukan sesuai standar dan pedoman dalam menunjang kelancaran aktivitas nelayan?
2. Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan yang terdapat pada Kelurahan Lappa?
3. Bagaimana strategi pengembangan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan di Kelurahan Lappa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui infrastruktur (prasarana & sarana) yang diperlukan dalam menunjang aktivitas masyarakat nelayan sesuai dengan standar, pedoman yang menjadi rujukan pengembangan aktivitas nelayan;

2. Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan yang terdapat pada Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. Rumusan strategi pengembangan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa.

1.4 Batasan dan Manfaat Penelitian

Batasan dari penelitian ini, ialah:

1. Penelitian ini difokuskan pada ketersediaan dalam pengembangan infrastruktur penunjang aktivitas terkait sarana prasarana di Kelurahan Lappa.
2. Secara spasial lokasi penelitian ini masuk pada wilayah administrasi Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kelurahan Lappa.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan pembelajaran dan latihan dalam dunia penelitian serta membuka wawasan peneliti terkait potensi dan ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat nelayan dalam mengembangkan kawasan minapolitan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
2. Bagi masyarakat, sebagai bahan referensi untuk membuka wawasan pengetahuan terkait infrastruktur penunjang kegiatan dan potensi desa nelayan. Diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan untuk mengasah, mengelola kelestarian lingkungan dan memenuhi dalam pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan;
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan rujukan, masukan, atau pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan arahan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dengan melihat potensi dan ancaman kedepan;
4. Bagi dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi terkait pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat di wilayah pesisir.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan yang disusun secara berurutan sebagai berikut:

Bagian I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang membahas pentingnya isu yang diangkat dalam penelitian ini; rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan penelitian. Isi pokok pada bab ini adalah mengungkapkan isu dan permasalahan terkait infrastruktur penunjang aktivitas nelayan yang berpengaruh pada ekonomi lokal masyarakat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bagian II Tinjauan Pustaka, berisi teori-teori mengenai pengembangan kawasan pesisir, infrastuktur, masyarakat nelayan dan perikanan, serta kerangka pikir. Menjelaskan kajian literatur, landasan teori yang mendukung penelitian ini, studi banding, penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti dan rangkuman penting berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dijawab.

Bagian III Metode Penelitian, menguraikan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah antara lain jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan dan kebutuhan data, teknik analisis data, serta kerangka penelitian.

Bagian IV Hasil dan Pembahasan, berisi gambaran umum penjabaran informasi umum terkait lokasi penelitian serta data-data umum terkait objek penelitian. Informasi berupa gambaran umum: kondisi fisik wilayah, kependudukan, kondisi aksesibilitas, transportasi, dan prasarana dan sarana eksisting. Penjabaran dan menganalisis data ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat nelayan berdasarkan rujukan-rujukan pustaka dengan menggunakan metode penelitian dan analisis yang telah direncanakan. Analisis pada penelitian ini merupakan evaluasi terhadap ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan nelayan yang ada di wilayah studi, melihat apakah telah terpenuhi dengan baik atau belum dan mengusulkan beberapa strategi pengembangan dalam pengembangan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan.

Bagian V Penutup, merupakan akhir dan hasil dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait keseluruhan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya serta saran dan masukan. berdasarkan hasil penelitian dan kekurangan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Kawasan

2.1.1 Konsep Kawasan

Konsep kawasan merupakan wilayah yang berbasis keberagaman fisik dan ekonomi namun tetap memiliki hubungan erat serta secara fungsional saling mendukung satu sama lain demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun kawasan diartikan sebagai suatu kawasan yang mempunyai fungsi tertentu, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya melalui kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya. (BAPPENAS, 2004)

Menurut BAPPENAS (2004) bahwa pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan kawasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya;
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah dan pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.

Disebutkan pula dalam BAPPENAS (2004) bahwa pengembangan kawasan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, perekonomian yang berorientasi global,

sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah, serta sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya lokal.

2. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah dan mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global dan memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Adapun pengembangan kawasan dapat diarahkan untuk mencapai beberapa hal jika dipandang dari segi kepentingan daerah (BAPPENAS, 2004), antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
- b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat atau rakyat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya serta meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan.
- c. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat atau rakyat serta mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

Kriteria kawasan yang berhasil (BAPPENAS, 2004) antara lain ialah:

- a. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah, dan mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya;

- b. Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.
- c. Memiliki kemampuan untuk memelihara SDA sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

2.1.2 Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pesisir

Perencanaan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah adalah suatu hal yang utama sebab dengan perencanaan yang tepat akan menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri. Perencanaan yang tepat adalah perencanaan yang dibuat atas dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah itu sendiri. Perencanaan juga akan menjadi bahan dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan yang mendukung perencanaan tersebut (Anugra Prasetyo, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana berasaskan keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan berasaskan keadilan.

PERDA Kabupaten Sinjai Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai tahun 2012-2032 dijelaskan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah salah satu upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

2.2 Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menurut Reksohadiprodjo dan Pradono (1988) dalam Jurnal Spasial Vol.6 No.1 Tahun 2019, pembangunan sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha. Namun, diketahui bahwa kegiatan perikanan merupakan usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumber daya disuatu perairan sehingga menyebabkan fluktuasi kegiatan usaha perikanan yang sangat jelas yang pada akhirnya aktivitas nelayan berpengaruh.

Pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait dalam usaha perikanan tangkap maupun budidaya saja. Peluang bisnis kelautan dan perikanan sendiri setidaknya dapat dilihat dari dua faktor yaitu: (1) Faktor internal, berupa potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana serta pemasaran, dan (2) Faktor eksternal, berkaitan dengan aspek permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan tersebut dalam rangka persaingan (Erwadi dan Syafri dalam Hendri, 2010).

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini dalam rangka persaingan. Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan. Melihat potensi yang ada pembangunan kelautan dan perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesai belum dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2010).

2.3 Kampung Nelayan

2.3.1 Pengertian Kampung Nelayan

Menurut Raharjo (2014), beberapa jenis kampung terdapat di Indonesia. Salah satu jenis kampung tersebut adalah kampung nelayan. Kampung nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman yang dihuni oleh masyarakat dengan pola kerja yang homogen, yaitu bermatapencaharian di bidang usaha perikanan laut. Keadaan perumahan dan permukiman masyarakat nelayan kurang memadai. Struktur

masyarakat nelayan secara umum merupakan struktur dua kelas atau dua lapisan, yaitu juragan dan nelayan kecil. Kehidupan masyarakat nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam musim dan faktor ekonomi. Kampung nelayan adalah sarana tempat tinggal bagi nelayan untuk menjalani masa hidupnya yang berfungsi sebagai kebutuhan dasar. Biasanya lokasi rumah nelayan dekat sekali dengan mata pencaharian pokok tempat berusaha yaitu sungai atau pantai. Kampung nelayan adalah bagian permukiman yang kurang terencana, karakteristik dan stratifikasi nelayan yang terpetakan secara sosiologis terdiri dari kelompok atas yaitu punggawa, menengah yaitu pemilik dan bawah adalah sawi, kelompok buruh merupakan mayoritas kurang mampu (Abdullah, 2001).

2.3.2 Pola Kampung Nelayan

Permukiman merupakan sekelompok rumah yang terorganisasi dalam suatu sistem sosial budaya dan religius yang tercermin pada fisik lingkungannya (Mulyati, 1995). Pada umumnya pola permukiman akan mengikuti sistem sosial budaya yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia. Pola permukiman kampung nelayan biasanya akan mengikuti garis pantai secara linear dengan kondisi cenderung bersifat homogen, tertutup dan mengembangkan tradisi tertentu sehingga memiliki ciri khas permukiman. Ciri dari permukiman kampung nelayan terlihat pada pola perletakan tiap massa bangunan yang berhubungan langsung dengan tempat produksinya, yaitu perairan atau laut dan kebutuhan aktivitasnya. Pola permukiman berdasarkan sifat komunitasnya menurut Kostof (1983) dalam penelitian Wardi, dkk (2014), yaitu:

- a. Sub Kelompok Komunitas, pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting, seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid dan sebagainya.
- b. Tatap muka (*Face to Face*), pola permukiman tipe ini berbentuk linear, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan secara linear terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu tambatan perahu atau dermaga, ruang penjemuran, pasar dan sebagainya. Kurniawan dkk (2002), menyebutkan bahwa model pengembangan permukiman nelayan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kondisi fisik kawasan dan luasan pantai
- 2) Fungsi kawasan
- 3) Orientasi kegiatan ekonomi masyarakat
- 4) Daya tampung kawasan
- 5) Ketersediaan lahan permukiman

2.3.3 Kehidupan di Kampung Nelayan

Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di Kampung Nelayan kaitannya dengan pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi (Cicin-Sain dan Knetch, 1998, dalam Sondita, 2001), meliputi:

- a. Perencanaan wilayah:
 - 1) Pengkajian lingkungan pesisir dan pemanfaatannya
 - 2) Penentuan zonasi pemanfaatan ruang dan pengaturan proyek-proyek pembangunan pesisir dan kedekatannya dengan garis pantai
 - 3) Penyuluhan masyarakat untuk apresiasi terhadap kawasan pesisir/ lautan dan pengaturan akses umum terhadap pesisir dan lautan
- b. Pembangunan ekonomi:
 - 1) Industri perikanan tangkap dan perikanan rakyat
 - 2) Wisata massal dan ekowisata, wisata bahari dan perikanan budidaya
 - 3) Perhubungan laut dan pembangunan pelabuhan dan pertambangan lepas pantai
 - 4) Penelitian kelautan & Akses terhadap sumberdaya genetika

2.3.4 Masyarakat Nelayan

Adapun karakteristik kehidupan masyarakat nelayan ditinjau dari aspek sosial, budaya dan ekonomi (Asriadi, 2018), sebagai berikut:

a. Masyarakat Nelayan Ditinjau dari Aspek Sosial

Hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan adalah akibat interaksi dengan lingkungannya yang dicirikan dalam sikap kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat erat dan gotong royong/paguyuban yang tinggi. Hal ini dapat tercermin pada pola permukimannya yang mengelompok dengan jarak yang saling berdekatan, sikap gotong royong yang tampak pada saat pembuatan rumah, memperbaiki

jala ikan, memperbaiki perahu, dan alat tangkap serta pada upacara adat, ketika akan melakukan penangkapan ikan yang juga dilakukan secara gotong royong di laut yang dipimpin oleh seorang punggawa.

b. Masyarakat Nelayan Ditinjau dari Aspek Budaya

Beberapa hal yang telah membudaya dalam masyarakat nelayan adalah kecenderungan hidup lebih dari satu keluarga dalam satu rumah atau mereka cenderung untuk menampung keluarga serta kerabat mereka dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan sering dijumpai jumlah anggota keluarga dalam satu rumah melebihi kapasitas daya tampung, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan terbatas. Dampaknya itu pula, mereka cenderung untuk memperluas rumah tanpa terencana. Adat kebiasaan yang turun temurun telah berlangsung pada masyarakat nelayan adalah seringnya mengadakan pesta syukuran atau selamat, misalnya pada waktu peluncuran perahu baru ketika akan melakukan pemberangkatan, dan saat berakhirnya musim melaut agar pada musim berikutnya mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lain-lain (Asriadi, 2018).

Masyarakat nelayan pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka sehingga menghambat kemajuan nelayan sendiri, antara lain sulitnya bagi pemerintah untuk memberi bantuan dalam bentuk penyuluhan maupun modernisasi peralatan (Mubyarto, 1984). Hal ini juga berpengaruh dalam lingkungan permukimannya, karena rendahnya pengetahuan akan pentingnya rumah sehat yang mengakibatkan mereka menganggapnya sebagai suatu kebutuhan.

c. Masyarakat Nelayan Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Usaha perikanan banyak tergantung pada keadaan alam, sehingga pendapatan nelayan tidak dapat ditentukan. Tingkat penghasilan nelayan umumnya terdiri dari; a) Penghasilan bersih yang diperoleh selama melaut jika seorang “sawi” maka besar pendapatannya sesuai dengan kesepakatan, dan b) Penghasilan sampingan yaitu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan, baik pekerjaan itu didapat ketika jadi buruh, bertani dan berdagang maupun pekerjaan atau kerajinan dalam mengelola hasil laut lainnya (Asriadi, 2018).

Kondisi ekonomi ketiga kelompok nelayan tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa umumnya taraf hidup kehidupan masyarakat nelayan penangkap ikan secara tradisional, termasuk paling rendah, sedangkan masyarakat pantai yang bergerak dibidang petempatan atau tambak menempati taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup teratas diduduki oleh masyarakat pedagang. Desa nelayan umumnya terletak dipesisir pantai, maka penduduk desa tersebut sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Melihat bahwa mereka berada pada daerah pesisir sehingga akan bertambah secara berkelompok-kelompok mengikuti pola lingkungan karena adanya faktor laut sebagai faktor pendukung, sehingga penduduk setempat mempunyai tata cara kehidupan yang bersifat tradisional dengan kehidupan yang spesifik pula.

2.4 Kawasan Minapolitan

Menurut UU Penataan Ruang No. 26/2007, Kawasan Minapolitan merupakan turunan dari Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan adalah gabungan dua kata, yaitu mina yang berarti “ikan” dan polis/politan yang berarti “kota”. Dengan demikian, Minapolitan diartikan sebagai kota perikanan. Sedangkan, Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER.12/MEN/2010 Tentang Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegritas, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan merupakan bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengelolah, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa atau kegiatan pendukung lainnya. (Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan No.

18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan). Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan atau pun kombinasi kedua hal tersebut.

Minapolitan atau disebut juga dengan kota perikanan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa *hinterland* atau wilayah sekitarnya melalui pembangunan ekonomi, yang tidak-terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan (*on farm* dan *off farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain yang dapat merupakan kota menengah, atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota perdesaan (Hamka, 2013)

2.4.1 Karakteristik Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan suatu kawasan minapolitan sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Kawasan minapolitan harus bisa tumbuh dan berkembang sebagai kawasan mandiri;
- d. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya;
- e. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

2.4.2 Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Diuraikan sebagai berikut:

- a. Perikanan Tangkap, perikanan tangkap adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum. Penjelasan dari perikanan tangkap diuraikan lebih lanjut berikut ini:

- 1) Perikanan Tangkap di Laut, adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut. Penangkapan ikan adalah semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di laut, muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi oleh amplitudo pasang surut;
 - 2) Perikanan Tangkap di Perairan Umum adalah semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan umum seperti sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, yang bukan milik perorangan atau badan hukum.
- b. Perikanan budidaya, budidaya perikanan merupakan bentuk usaha untuk memproduksi biota secara terkontrol dalam rangka memperoleh keuntungan. Ruang lingkup budidaya perikanan berdasarkan spasial mencakup kawasan sejak pegunungan hingga laut dalam, berdasarkan sumber air yang dimanfaatkan mencakup budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Berdasarkan pada kegiatan mencakup pengadaan sarana dan prasarana produksi, proses produksi hingga pemanenan serta penanganan pascapanen dan pemasaran.

2.4.3 Sumber Daya Manusia Kawasan Pesisir

Sumber daya manusia di setiap kawasan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Khusus di kawasan pesisir, masyarakat pesisir berbeda setiap komunitas. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir merupakan tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Desa terisolasi diantaranya para nelayan yang tidak punya akses dan hanya mengabdikan dirinya kepada sumber laut. Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan.

Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatanyang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. Nelayan menghadapi sumber daya yang bersifat *open acces* dan beresiko tinggi. Hal tersebut

menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka” (Afrizal, 2013).

2.4.4 Infrastruktur Penunjang Aktivitas Nelayan

Infrastruktur penunjang aktivitas nelayan merupakan prasarana dan sarana nelayan yang dapat menunjang kelancaran aktivitas kenelayanannya. Pembahasan berikut ini mengenai prasarana dan sarana sebagai infrastruktur penunjang aktivitas nelayan berdasarkan standar dan pedoman.

2.4.4.1 Prasarana Penunjang

Berikut ini prasarana dasar yang menunjang aktivitas nelayan yang diatur dalam undang-undang, standar dan pedoman yang berlaku, yaitu:

2.4.4.1.1 Prasarana Jaringan Jalan

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan ialah jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Pasal 7 UU No. 38 Tahun 2004, sistem jaringan jalan dibagi atas sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jalan distirbusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Adapun UU No. 38 Tahun 2004 menurut statusnya, jalan dikelompokkan menjadi:

- 1) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
- 2) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota;

- 3) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan 17 lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
- 4) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota;
- 5) Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Bagian-bagian jalan sebagaimana berdasar pada Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 antara lain meliputi ruang manfaat jalan (meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya), ruang milik jalan (meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luas ruang manfaat jalan), dan ruang pengawasan jalan yang merupakan ruang tertentu di luar milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

2.4.4.1.2 Prasarana Listrik

Menurut UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ialah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Adapun tenaga listrik ialah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Pembangkit listrik merupakan produsen tenaga listrik yang dilakukan di pusat tenaga listrik dengan mempergunakan penggerak mula atau generator. Transmisi merupakan pemindahan tenaga listrik dari pusat tenaga listrik ke gardu induk yang terletak berdekatan dengan suatu pemakaian seperti kota atau kawasan industri. Sistem distribusi kemudian ke para pemakai/ konsumen listrik.

Indikator penilaian pelayanan listrik dapat dilihat dari variabel-variabel cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan. Indikator cakupan pelayanan dapat ditentukan melalui dua acara, yaitu jumlah penduduk terlayani dibandingkan dengan total

jumlah penduduk kota, atau luas jangkauan pelayanan dibandingkan dengan luas wilayah kota. Indikator kualitas pelayanan, dapat dilihat dari frekuensi listrik padam pada wilayah tersebut (Retno, 2007). Adapun asumsi kebutuhan listrik pada suatu kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Tiap Kepala Keluarga (KK) diasumsikan membutuhkan energy listrik antara 1900 VA sampai dengan 2.200 VA.
- 2) Untuk fasilitas sosial dan ekonomi diasumsikan membutuhkan energi listrik sebesar 50% dari kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk kebutuhan penerangan jalan diasumsikan 10% dari kebutuhan rumah tangga.

Pemenuhan kebutuhan listrik dilaksanakan oleh unit-unit pembangkit listrik untuk melayani kebutuhan akan penerangan. Dengan demikian akan memerlukan peningkatan daya listrik. Kebutuhan akan daya listrik dimanfaatkan untuk mendistribusikan kebutuhan penerangan perumahan, penerangan jalan, dan kegiatan aktivitas lainnya. Jaringan listrik di Kelurahan Lappa diarahkan dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jaringan distribusi utama dibentuk mengikuti pola jaringan jalan utama, sistem jaringan yang digunakan terbuka dan memungkinkan untuk kebutuhan perluasan.
- 2) Sistem sambungan.
- 3) Jaringan cabang kerumah-rumah disesuaikan dengan jaringan jalan dan lokasi setempat.

2.4.4.1.3 Drainase

Drainase merupakan saluran yang dibuat sebagai tempat dialirkan atau dibuangnya air hujan yang jatuh di suatu daerah agar tidak terjadi genangan atau banjir. Sistem drainase terdiri dari saluran (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), dan saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*), dan badan air penerima (*receiving waters*). Di sepanjang sistem dijumpai bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, jembatan air (*aqueduct*), pelimpah, pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tando, dan stasiun pompa. Hanya air yang telah memenuhi baku mutu air tertentu yang dimasukkan ke badan air penerima, sehingga tidak

merusak lingkungan (Suripin, 2004:8). Adapun fungsi dari drainase menurut Robert J. Kodoatie (2005) ialah:

- a) Membebaskan suatu wilayah (terutama padat permukiman) dari genangan air, erosi, dan banjir;
- b) Karena aliran lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko kesehatan lingkungan; bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya;
- c) Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar dari kelembapan; dan
- d) Dengan sistem yang baik, tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan-bangunan lainnya.

2.4.4.1.4 Persampahan

Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Sumber limbah padat terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja dan sampah spesifik). Sampah sejenis rumah tangga berasal dari kawasan komersial, fasilitas umum dan tau fasilitas lainnya. Sampah sejenis rumah tangga meliputi sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkahan bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Menurut Permen PU Nomor 3 Tahun 2013, komponen pengelolaan sampah terdiri atas lima kegiatan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Adapun faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan sampah sampai ke tempat pembuangan adalah sebagai berikut (Kodoatie, 2005).

- a) Sumber sampah
- b) Waktu pengumpulan
- c) Pemilihan peralatan
- d) Petunjuk rute pengangkutan

- e) Perkiraan jumlah sampah
- f) Waktu pengangkutan
- g) Kebutuhan tenaga kerja
- h) Tempat pembuangan akhir (TPA)

Adapun asumsi produksi sampah adalah sebagai berikut:

- a) Sampah dari permukiman 2 liter/orang/hari
- b) Pasar 0,4 liter/orang/hari terhadap 25% penduduk
- c) Kantor 0,1 liter/orang/hari terhadap 10% penduduk
- d) Jalan 0,2 liter/orang/hari terhadap 10% penduduk
- e) Toko 0,2 liter/orang/hari terhadap 10% penduduk

2.4.4.1.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut PERMEN PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ialah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Disebutkan juga mengenai penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan sebagai berikut:

- a) RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
- b) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% terdiri dari RTH Privat;
- c) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaanya.

Adapun penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dan tipe RTH dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman Taman Kota	disesuaikan 144.000	1,2 0,3	tersebar Di pusat wilayah/kota
5	480.000 jiwa	Hutan Kota	disesuaikan	4,0	Di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: PERMEN PU, 2008

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas bahwa penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dalam menentukan luas RTH dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai peraturan yang berlaku.

2.4.4.1.6 Jaringan Air Bersih

Air bersih menurut SK MENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990 ialah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Menurut Kodoatie (2005), sistem infrastruktur air bersih secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Eksplorasi sumber daya air
 - a. Sumber daya air permukaan (sungai, danau, waduk, dll).
 - b. Sumber daya air tanah (sumur, pemompaan, dll).
- 2) Pengolahan
 - a. Penjernihan dari partikel lain (*sedimentation, flocculation, filtration*, dll).
 - b. Pengontrolan bakteri air (*disinfection, ultra violet ray, ozone treatment*, dll).

- c. Komposisi kimia air (*aeration, iron dan manganese removal, carbon activated, dll*).
- 3) Penampungan
- a. Penampungan bahan baku air (*waduk, sungai/long storage*).
 - b. Penampungan bahan baku air olahan (*tangki tertutup, kolam terbuka, dll*)
- 4) Transmisi
- a. Truk tangki, kapal tanker dan moda lain (*ada resiko kehilangan, tidak dapat menjamin tepat waktu, debit dan kualitas*).
 - b. Jaringan pipa transmisi dari primer ke sekunder.
 - c. Bak pelepas tekan.
 - d. Pipa (*minimum kehilangan, dapat menjamin tepat waktu, debit dan kualitas*).
- 5) Jaringan distribusi ke pelanggan: sistem jaringan pipa, sistem tampungan, *Fittings, Control, Valve*, dan Pompa.

Kebutuhan air bersih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan air bersih domestik dan kebutuhan air bersih non-domestik. Kebutuhan air bersih domestik ialah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau kebutuhan air sehari-hari seperti air untuk diminum, mandi, mencuci, dll. Kebutuhan air bersih domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi per kapita. Olehnya itu, untuk memprediksi kebutuhan air domestik di masa datang dapat dilakukan melalui proyeksi penduduk. Kebutuhan air domestik dipengaruhi pula oleh pola konsumsi penduduk berdasarkan kategori kota tempat tinggal, dimana penduduk kota besar cenderung menggunakan air lebih banyak dibandingkan penduduk desa. Standar kebutuhan air domestik dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Standar Kebutuhan Air Domestik

Uraian	Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (jiwa)				
	> 1.000.000	500.000 s/d 1.000.000	100.000 s/d 500.000	20.000 s/d 100.000	<20.000
	Kota Metropolitan	Kota Besar	Kota Sedang	Kota Kecil	Desa
Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/org/hari)	>150	120 – 150	90 – 120	80 – 120	60 – 80

Uraian	Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (jiwa)				
	> 1.000.000	500.000 s/d 1.000.000	100.000 s/d 500.000	20.000 s/d 100.000	<20.000
	Kota Metropolitan	Kota Besar	Kota Sedang	Kota Kecil	Desa
Konsumsi Unit Hidran (HU) (liter/org/hari)	20 - 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40

Sumber: Ditjen Cipta Karya PU, 2000

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa standar kebutuhan air domestik dalam kategori kota berdasarkan jumlah penduduknya ialah untuk konsumsi unit sambungan rumah, kota metropolitan yang paling besar kebutuhan air domestiknya sedangkan untuk konsumsi unit hidran, mulai dari desa hingga kota metropolitan memiliki kebutuhan standar 20-40. Adapun kebutuhan air non-domestik ialah kebutuhan air yang digunakan untuk pemanfaatan komersial, kebutuhan institusi dan kebutuhan industri atau kebutuhan air bersih di luar keperluan rumah tangga. Standar kebutuhan air non domestik dirincikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Standar Kebutuhan Air Non Domestik untuk Kota Kategori 1, II, III, IV

Sektor	Nilai	Satuan
Sekolah	10	Liter/murid/hari
Rumah Sakit	200	Liter/bed/hari
Puskesmas	2000	Liter/hari
Masjid	3000	Liter/unit/hari
Kantor	10	Liter/pegawai/hari
Pasar	12000	Liter/hektar/hari
Hotel	150	Liter/bed/hari
Rumah Makan	100	Liter/tempat duduk/hari
Komplek Militer	60	Liter/orang/hari
Kawasan Industri	0,2 - 0,8	Liter/detik/hektar
Kawasan Pariwisata	0,1 – 0,3	Liter/detik/hektar

Sumber: Ditjen Cipta Karya PU, 2000

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa standar kebutuhan air non domestik tertinggi untuk kota dalam kategori I, II, III, dan IV ialah pasar. Adapun tabel berikut ini merupakan standar kebutuhan air non domestik untuk kategori desa.

Tabel 2.4 Standar Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori V (Desa)

Sektor	Nilai	Satuan
Sekolah	5	Liter/murid/hari
Rumah Sakit	200	Liter/bed/hari
Puskesmas	1200	Liter/unit/hari
Masjid	3000	Liter/unit/hari
Mushola	2000	Liter/unit/hari
Pasar	12000	Liter/hektar/hari
Komersial/Industri	10	Liter/hari

Sumber: Ditjen Cipta Karya PU, 2000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa standar dari kebutuhan air non domestik untuk kategori V (desa). Pada sektor sekolah memiliki standar kebutuhan air non domestik 5 liter/murid/hari sedangkan pada sektor komersial atau industri memiliki kebutuhan air non domestik sebanyak 10 liter/hari. Adapun kebutuhan air non domestik untuk kategori lain dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori Lain

Sektor	Nilai	Satuan
Lapangan Terbang	10	Liter/orang/detik
Pelabuhan	50	Liter/orang/detik
Stasiun KA dan Terminal Bus	10	Liter/orang/detik
Kawasan Industri	0,75	Liter/detik/hektar

Sumber: Ditjen Cipta Karya PU, 2000

Pada tabel di atas terlihat bahwa yang memiliki kebutuhan air non domestik paling tinggi ialah sektor pelabuhan sedangkan sektor kawasan industri merupakan sektor yang membutuhkan air domestik paling rendah.

2.4.4.2 Sarana Penunjang Aktivitas Nelayan

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan.

Infrastruktur juga merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial ekonomi wilayah

yang didukung serta dipelopornya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan infrastruktur, serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman sehingga keberadaannya haruslah tepat guna dalam arti tepat tempat dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengembangan suatu kawasan dengan penyediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan. Dalam pengembangan kawasan Minapolitan pun membutuhkan penyediaan sarana prasarana penunjang untuk kebutuhan aktivitas nelayan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa infrastruktur (sarana prasarana) yang diperlukan dalam menunjang aktivitas masyarakat nelayan yang menjadi rujukan adalah standar/ persyaratan minimum untuk suatu desa sesuai Pedoman Umum Minapolitan yang dituang dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013** yang dituang dalam Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Prasarana dan sarana penunjang menurut
Permen No.35/KEPMEN-KP/2013

NO.	PRASARANA PENUNJANG
1	Jaringan Jalan , merupakan salah satu prasarana yang sangat penting. Dengan adanya transportasi jalan maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan baik.
2	Jaringan Listrik , merupakan utilitas yang berfungsi untuk penerangan rumah tangga, jalan , maupun kegiatan lainnya.
3	Jaringan Air Bersih , merupakan utilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap kawasan perlu penyediaan sumber air bersih, pelayanan sumber air bersih baik dari pelayanan PDAM atau dapat menyediakan sendiri dengan melalui sumur gali dan/atau bor.
4	Dermaga , merupakan prasarana yang berfungsi sebagai tempat labuh, bertambatnya kapal penangkap ikan dan membongkar hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk menangkap ikan di laut.
NO.	SARANA PENUNJANG
1	Lembaga Masyarakat (kelompok tani/nelayan), merupakan tempat berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perikanan.
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) , merupakan pusat pelayanan pembinaan dan pemasaran hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya perikanan serta tempat pengembangan industry perikanan/pelayanan ekspor.
3	Bank dan Koperasi , merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat peminjaman uang bagi nelayan.

NO.	SARANA PENUNJANG
4	Pabrik Es , merupakan sarana yang berfungsi untuk kebutuhan es, agar dapat mempertahankan mutu produksi selama proses panen dan distribusikan.
5	SPBU/SPDN , merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi masyarakat khususnya bagi para nelayan
6	Lapangan Penjemuran Jala/Ikan , merupakan sarana yang digunakan sebagai tempat untuk menjemur jala yang sudah di pakai agar tidak bau amis dan tempat penjemuran ikan.
7	Industri Pengolahan Perikanan , merupakan usaha pengolahan perikanan yang merupakan industry kecil dan rumah tangga, adapun hasil pengolahannya yaitu ikan asap, ikan kering/asin dan abon ikan.
8	Docking Bengkel , untuk perawatan dan perbaikan mesin kapal dan kapal-kapal nelayan.
9	Gudang Pengepakan/Pengolahan merupakan sarana untuk penyimpanan dan pengolah komoditi unggulan yang akan diekspor
10	Penyediaan Benih , merupakan sarana menyediakan benih.
11	Cold Storage/Cold Room , merupakan sarana yang berfungsi untuk mendinginkan hasil tangkap agar hasil produksi tetap awet.

Sumber: PERMEN Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35/KEPMEN-KP/2013, 2013

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya prasarana dasar yang dapat menunjang aktivitas nelayan adalah terpenuhinya jaringan jalan, listrik, air bersih, serta dermaga yang ideal. Sedangkan sarana kenelayanan yang dapat menunjang aktivitas nelayan adalah tersedianya lembaga masyarakat/ balai pertemuan nelayan, TPI, bank dan koperasi, pabrik es, SPBU/SPDN, lapangan penjemuran ikan/jala, industri pengolahan perikanan, bengkel perahu, gudang pengepakan dan ruang pendingin (*cold storage*).

Menurut Latene (2015) bahwa infratraktur minapolitan diarahkan mendukung pengembangan sistem dan usaha minabisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra produksi minapolitan, yaitu:

1. Sarana Produksi, bertujuan sebagai sarana yang menunjang subsistem produksi dalam rangka meningkatkan usaha budidaya perikanan. Jenis sarana produksi dapat berupa:

a. Sarana Pembenihan

Syarat atau kriteria pada fasilitas pokok pada umumnya yang dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan produksi pembenihan (Latene, 2015), yaitu:

- 1) Bak penampungan air tawar dan air laut
- 2) Bak pemeliharaan induk

- 3) Bak pemeliharaan telur
- 4) Bak pemeliharaan larva

2. Sarana Pengolahan, sarana ini bertujuan untuk mendukung subsistem pengolahan berupa industri-industri pengolahan hasil perikanan sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis sarana pengolahan dapat berupa:

a. Gudang Penyimpanan hasil perikanan seperti sarana pengawetan/pendinginan (*Cold storage*, Gudang Pengemasan)

Sesuai dengan SNI 7331-2007 tentang Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian, persyaratan untuk merencanakan sebuah Gudang Pertanian adalah:

- 1) Terletak di dekat atau pinggir jalan;
- 2) Aman dari banjir dan longsor;
- 3) Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya;
- 4) Terpisah dari bangunan lain;
- 5) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah.

b. Lapangan Penjemuran Ikan/Jala

Menurut Syahrianto (2013) bahwa sarana kampung nelayan juga perlu adanya: Tempat Pelelangan Ikan, Tambatan Perahu dan Tempat Penjemuran Ikan. Adapun tempat penjemuran ikan ialah tempat yang berfungsi untuk mengeringkan ikan dan proses pengawetan. Adapun syarat-syarat tempat penjemuran ikan, yaitu:

- 1) Tempat penjemuran ikan sebaiknya berupa lapangan terbuka atau tempat yang terkena sinar matahari secara langsung;
- 2) Wadah penjemuran ikan sebaiknya berlubang agar air dapat turun dan proses pengeringan cepat dan tidak berkarat;
- 3) Tempat penjemuran ikan harus diusahakan bersih dengan membuat saluran pembuangan;
- 4) Sebaiknya tersedia jaringan drainase agar tidak terjadi genangan air yang akan menimbulkan bau tidak sedap;
- 5) Lokasi penjemuran ikan sebaiknya mudah diawasi.

c. Pabrik Es

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.21/MEN/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 halaman 37, pada bagian 3 (b) persyaratan teknis yaitu sebagai berikut:

- 1) Persyaratan yang harus dipertimbangkan untuk pembangunan pabrik es, antara lain:
 - a) Mempunyai sumber air bersih;
 - b) Volume produksi hasil perikanan cukup; dan
 - c) Ketersediaan/suplai es yang rendah atau belum ada.
- 2) Persyaratan teknis pabrik es didasarkan pada persyaratan teknis pendinginan (*refrigerasi*) dan bangunan yang ada dengan memperhatikan fungsi dari masing-masing pekerjaan sebagai sarana untuk memproduksi es.

Adapun pada bagian (c) pelaksanaan disebutkan bahwa kegiatan pembangunan pabrik es dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, antara lain:

- a) Fasilitas pokok meliputi mesin pembuat es (*refrigerator*), bangunan gedung produksi, air bersih, instalasi listrik (*genset* dan *ice storage*); dan/atau
- b) Fasilitas penunjang meliputi bangunan gedung kantor.

d. Industri Pengolahan Perikanan

- 3. Sarana Pemasaran**, bertujuan untuk mendukung subsistem pemasaran hasil perikanan. Termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, dan informasi pasar. Jenis sarana pemasaran dan perdagangan hasil perikanan seperti: pasar tradisional, tempat pelelangan ikan.

Pelaksanaan pelelangan ikan diatur oleh Peraturan Daerah No.10 dan Peraturan Daerah No.11, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan nelayan;
- 2) Meningkatkan eksistensi pelelangan ikan;
- 3) Meningkatkan kelayakan TPI;

- 4) Meningkatkan Fungsi TPI;
- 5) Meningkatkan aplikasi aturan pelelangan ikan.

Adapun dalam Direktorat Jenderal Perikanan (1995) bahwa fungsi pelabuhan (PPI):

- 1) Pusat pengembangan masyarakat nelayan
- 2) Tempat berlabuh kapal perikanan
- 3) Tempat pendaratan ikan hasil tangkap
- 4) Tempat memperlancar kegiatan kapal perikanan
- 5) Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan
- 6) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkap
- 7) Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan

4. Sarana Penunjang Lainnya, sarana yang membantu menunjang aktivitas perikanan nelayan, dapat berupa Bank/Koperasi, SPDN, Lembaga Masyarakat dan Bengkel Perahu.

Adapun rangkuman dari kajian teori yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Rangkuman Kajian Teori

No	Prasarana dan Sarana	Syarat/kriteria
1	Jaringan Jalan	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan: 1. Sistem jaringan jalan primer, meliputi: a. Jalan kolektor b. Jalan arteri 2. Sistem jaringan jalan sekunder, meliputi: a. Jalan kolektor b. Jalan arteri
2	Listrik	Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, yaitu: a) Sistem pembangkit b) Transmisi (penyaluran) c) Sistem distribusi
3	Air bersih	SK MENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990, sistem air bersih secara umum ialah: a) Eksplorasi sumberdaya air b) Pengolahan c) Penampungan d) Transmisi e) Jaringan distribusi ke pelanggan

No	Prasarana dan Sarana	Syarat/kriteria
4	Sarana Produksi a. Sarana Pembenihan	Fasilitas pokok pada umumnya yang dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan produksi pembenihan, yaitu: a) Bak penampungan air tawar dan air laut b) Bak pemeliharaan induk c) Bak pemeliharaan telur d) Bak pemeliharaan larva
5	Sarana Pengolahan	
	b. Sarana pengawetan /pendinginan (<i>Cold storage</i> , Gudang Pengepakan)	Sesuai dengan SNI 7331-2007 tentang Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian, persyaratan untuk merencanakan sebuah Gudang Pertanian adalah: a) Terletak di dekat atau pinggir jalan; b) Aman dari banjir dan longsor; c) Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya; d) Terpisah dari bangunan lain; e) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah.
	c. Lapangan Penjemuran Ikan/Jala	Menurut Syahrianto (2013) bahwa sarana kampung nelayan juga perlu adanya Tempat Penjemuran Ikan. Adapun syarat-syarat tempat penjemuran ikan, yaitu: a) Tempat penjemuran ikan sebaiknya berupa lapangan terbuka atau tempat yang terkena sinar matahari secara langsung; b) Wadah penjemuran ikan sebaiknya berlubang agar air dapat turun dan proses pengeringan cepat dan tidak berkarat; c) Tempat penjemuran ikan harus diusahakan bersih dengan membuat saluran pembuangan; d) Sebaiknya tersedia jaringan drainase agar tidak terjadi genangan air yang akan menimbulkan bau tidak sedap; e) Lokasi penjemuran ikan sebaiknya mudah diawasi.
	d. Pabrik Es	Menurut PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No. PER.21/MEN/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 halaman 37, yaitu: Bagian 3 (b) Persyaratan Teknis: a) Persyaratan yang harus dipertimbangkan untuk pembangunan pabrik es: 6) Mempunyai sumber air bersih; 7) Volume produksi hasil perikanan cukup; 8) Ketersediaan/suplai es yang rendah atau belum ada b) Persyaratan teknis pabrik es didasarkan pada persyaratan teknis pendinginan (<i>refrigerasi</i>)

No	Prasarana dan Sarana	Syarat/kriteria
		<p>dan bangunan yang ada dengan memperhatikan fungsi dari masing-masing pekerjaan sebagai sarana untuk memproduksi es.</p> <p>Bagian (c) Pelaksanaan: Kegiatan pembangunan pabrik es dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:</p> <p>a) Fasilitas pokok meliputi mesin pembuat es (<i>refrigerator</i>), bangunan gedung produksi, air bersih, instalasi listrik (genset dan <i>ice storage</i>); dan/atau</p> <p>b) Fasilitas penunjang meliputi bangunan gedung kantor.</p>
6	Sarana Pemasaran e. Pelelangan Ikan	<p>Pelaksanaan pelelangan ikan diatur oleh Peraturan Daerah No.10 dan Peraturan Daerah No.11, sebagai berikut:</p> <p>a) Meningkatkan pendapatan nelayan;</p> <p>b) Meningkatkan eksistensi pelelangan ikan;</p> <p>c) Meningkatkan kelayakan TPI;</p> <p>d) Meningkatkan Fungsi TPI;</p> <p>e) Meningkatkan aplikasi aturan pelelangan ikan.</p>
7	Pelabuhan Perikanan	<p>Direktorat Jenderal Perikanan (1995) bahwa fungsi pelabuhan:</p> <p>a) Pusat pengembangan masyarakat nelayan</p> <p>b) Tempat berlabuh kapal perikanan</p> <p>c) Tempat pendaratan ikan hasil tangkap</p> <p>d) Tempat memperlancar kegiatan kapal perikanan</p> <p>e) Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan</p> <p>f) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkap</p> <p>g) Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan</p>

Sumber: Penulis, 2022

2.5 Kebijakan-kebijakan

2.5.1 Peraturan Daerah Prov. Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang RTRW Prov. Sulawesi Selatan 2009-2029

1. Kabupaten Sinjai termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
2. Kabupaten Sinjai juga termasuk dalam sistem tatanan kepelabuhanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan alur pelayanan Sinjai-Raha (Pasal 21 ayat (2) dan (3) yang berfungsi dalam sistem jaringan transportasi jalur laut
3. Kabupaten Sinjai termasuk dalam Kawasan Potensial Budidaya Rumput Laut meliputi wilayah perairan pantai atau tambak (Pasal 56 huruf e)

2.5.2 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

1. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa dari kawasan pesisir dan laut **Kecamatan Sinjai Utara** sebagai **Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap**.
2. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa sebagian wilayah **Kecamatan Sinjai Utara** sebagai **Kawasan Budidaya Perikanan** yakni kbp air payai dan kbp air laut.
3. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 40 ayat (4) menyebutkan bahwa sebagian wilayah **Kecamatan Sinjai Utara** ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai Kawasan Minapolitan.
4. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 40 ayat (5) menyebutkan bahwa ditetapkan Pelabuhan Perikanan di **Kecamatan Sinjai Utara** yakni Pelabuhan Perikanan **Lappa**.
5. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri Besar Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa di sebagian wilayah **Kecamatan Sinjai Utara** merupakan **Kawasan Industri Pengolahan Ikan**; ayat (3) menyebutkan bahwa **Kawasan Peruntukan Industri Menengah** menyebutkan bahwa dari sebagian wilayah **Kecamatan Sinjai Utara**; dan ayat (4) menyebutkan bahwa **Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga** berupa Kawasan Aglomerasi Industri Rumah Tangga berupa Industri Pengolahan Hasil-hasil Pertanian ditetapkan sebagian wilayah **Kecamatan Sinjai Utara**.

2.5.3 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 menjelaskan RZWP3K diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi. Sasaran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

1. Tersedianya pedoman Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;

3. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 4. Terlindunginya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 5. Tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan pulau-pulau kecil, baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan; dan
 6. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- Kebijakan Rencana Wilayah Pengembangan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Sinjai, meliputi :
- a) Wilayah Pengembangan Pesisir Utara (WPP Utara), dengan pusat pengembangan di Balangnipa dan **Lappa**, wilayah pengembangan ini meliputi wilayah perairan dan pusat-pusat kegiatan sekunder di pesisir utara hingga perbatasan dengan Kabupaten Bone;
 - b) Wilayah Pengembangan Pesisir Selatan (WPP-S), dengan pusat pengembangan di ibukota kecamatan Sinjai Timur. Wilayah pengembangan ini meliputi wilayah kecamatan dan perairan kecamatan Sinjai Timur, Tellu Limpoe sampai dengan perbatasan dengan kabupaten Bulukumba; dan
 - c) Wilayah Pengembangan Kepulauan (WPK), dengan pusat pengembangan di Pulau Harapan, wilayah pengembangan ini meliputi seluruh wilayah perairan kecamatan dan pulau Sembilan hingga 4 (empat) mil dari garis pantai. Wilayah Pengembangan Pesisir Utara (WPP Utara) berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan wilayah dimana Kota Balangnipa ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama, sementara **Lappa** dan sekitarnya menjadi pusat pengembangan niaga Maritim. Wilayah Pengembangan Pesisir Selatan (WPP Selatan) berfungsi sebagai kawasan konservasi mangrove dan pariwisata pantai ,Wilayah Pengembangan Kepulauan (WPK) berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, kawasan konservasi dan pariwisata.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan strategi pengembangan tentu perlu melihat penelitian terdahulu, berikut ini diuraikan dalam Tabel 2.8 ringkasan kelima penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu

PENULIS	Anugra Prasetyo La'lang Surbakti, Linda Tondobala, dan Suryadi Supardjo	Liwe Brian Larnia, Michael M. Rengkung dan Esli D. Takumansang	Mass Syabirin Thaher	A. Mutia Auliya Saad	Desti Rahayu Lataena	Ifriany Tri Wastuti	Beddu Tang dan Asmidar
JUDUL	Analisis Tingkat Pelayanan Infrastruktur Pendukung Kawasan Minapolitan Petasia di Kabupaten Morowali Utara	Ketersediaan Prasarana Sarana Dalam Mendukung Kawasan Minapolitan di Kabupaten Minahasa Selatan	Pengembangan Infrastruktur Kampung Nelayan Malabero di Kawasan Wisata Pantai Tapak Paderi Kota Bengkulu	Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Obyek Wisata Bahari Pulau Sembilan di Kabupaten Sinjai	Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan (Studi Kasus: Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)	Strategi Arahan Pengembangan Permukiman Nelayan Berbasis Ekowisata	Kajian Mina Wisata Sebagai Alternatif Wisata Bahari di Kawasan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai
SUMBER	Jurnal Spasial Vol.6 No.1,2019	Jurnal Universiatas Samratulangi 2017	Jurnal Universitas Sam Ratulangi 2009	Skripsi UIN Alauddin Makassar 2010	Skripsi Universitas Hasanuddin 2019	Skripsi UIN Alauddin Makassar 2014	Journal of Indonesian TropiCAL Fisheries Vol. 2 No.2 2019
TUJUAN	Untuk mengetahui tingkat pelayanan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kawasan Minapolitan Petasia	Untuk menganalisis ketersediaan prasarana sarana dalam mendukung Minahasa Selatan sebagai Kawasan Minapolitan	Untuk merumuskan arahan pengembangan infrastruktur di Kampung Nelayan agar dapat mendukung	Penelitian ini bertujuan untuk untuk jenis prasarana dan sarana kepariwisataan yang dibutuhkan di Pulau Sembilan serta strategi yang	Untuk mengidentifikasi potensi perikanan yang dapat dikembangkan, dan permasalahan infrastruktur Kawasan Minapolitan Malili, serta	untuk merumuskan arahan pengembangan kawasan permukiman nelayan berbasis ekowisata di Kecamatan Pulau	untuk mengkaji potensi sumberdaya alam perikanan pulau Sembilan dalam menunjang aktifitas wisata bahari dan untuk mennetukan tingkat

	di Kabupaten Morowali Utara		keberadaan wisata pantai	dapat dilakukan dalam menyediakan prasarana dan sarana kepariwisataan di Pulau Sembilan.	merekomendasikan arahan pengembangan zona Kawasan Minapolitan dan arahan pengembangan infrastruktur Kawasan Minapolitan	Sembilan Kabupaten Sinjai.	kesesuaian lahan dalam upaya menjamin keberlangsungan sumberdaya alam perikanan di Pulau Sembilan
METODE	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Kuantitatif dan Kualitatif b. Metode Penelitian Pustaka c. Teknik wawancara mendalam d. Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif e. Analisis Tingkat Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Deskriptif Kualitatif b. Penelitian Lapangan c. Metode Penelitian Pustaka d. Teknik wawancara mendalam e. Analisis Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Deskriptif Kualitatif b. Teknik Sampling c. Penelitian Lapangan d. Teknik Analisis Rasionalistik Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Deskriptif Kualitatif Lapangan c. Metode penelitian Pustaka d. Analisis SWOT e. Analisis Deskriptif f. Analisis Skala Likert 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Deskriptif Kualitatif Lapangan c. Metode penelitian Pustaka d. Analisis LQ e. Analisis <i>Supply Chain</i> f. Analisis <i>Skala Likert</i> g. Analisis <i>LOS</i> h. Analisis Skalogram 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Deskriptif Kualitatif Lapangan c. Metode penelitian Pustaka d. Analisis SWOT e. Analisis Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Kuantitatif dan Kualitatif
HASIL	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan infrastruktur	Hasil penelitian menunjukkan dari penelitian sitemik bahwa hasil analisis rekapitulasi kategori	Hasil penelitian membahas tentang infrastruktur dikampung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan prasarana dan sarana	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: - Hasil analisis LQ: perikanan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman nelayan di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Pulau Sembilan

	<p>memiliki nilai tertinggi dan nilai terendah adalah variabel kondisi infrastruktur.</p>	<p>ketersediaan prasarana sarana kebutuhan pada kawasan Minapolitan di Kecamatan Tatapan bahwa tingkat ketersediaan untuk prasarana dikategorikan sedang dan sarana rendah.</p>	<p>nelayan malabero belum dapat dikatakan mendukung keberlangsungan kegiatan penduduk secara optimal dan menunjang keberadaan wisata pantai yang ada disekitar permukiman mereka, untuk mewujudkannya diperlukan suatu arahan pengembangan infrastruktur yang mencakup kriteria yang harus dicapai</p>	<p>kepariwisataan di Pulau Sembilan meliputi Utilitas, aksesibilitas, akomodasi, jasa pangan, dan fasilitas penunjang. Strategi pengembangan prasarana dan sarana kepariwisataan di Pulau Sembilan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penunjang kepariwisataan dengan memanfaatkan investasi.</p>	<p>tangkap yang unggul yaitu tuna, teri, dan cakalang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisis Skala Likert: ketersediaan sarana Kawasan Minapolitan di Kecamatan Malili - Hasil analisis skalogram: berdasarkan indeks sentralisasi diperoleh hirarki pelayanan dan rekomendasi arahan zonasi kawasan minapolitan. 	<p>Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai merupakan kawasan prioritas pengembangan permukiman nelayan.</p>	<p>memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan pada masa yang akan datang sebagai obyek wisata bahari.</p>
--	---	---	--	--	---	---	---

Sumber: Penulis, 2022

Tabel 2.9 Variabel Penelitian Penelitian Terdahulu

Sumber Teori	Variabel		Indikator															
	Prasarana dan Sarana Penunjang Aktivitas Nelayan																	
	Prasarana Penunjang									Sarana Penunjang								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Anugra Prasetyo La'lang Surbakti, 2019	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Liwe Brian Larnia, 2017	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Desti Rahayu Lataena, 2019	√	√	√				√	√	√	√		√	√	√	√		√	√
Fitrawan Umar, 2011	√	√	√		√		√	√	√	√	√			√	√			
Nurul Fajriani, 2015	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√

Sumber: Penulis, 2022

A: Jaringan Jalan

F: Drainase

K: Pabrik Es

P: Penyediaan Benih

B: Listrik

G: Dermaga

L: SPDN/SPBU

Q: Gudang Pengepakan/

C: Air Bersih

H: Lembaga Masyarakat

M: Lapangan Penjemuran Ikan/Jala

Pengolahan

D: Ruang Terbuka Hijau

I: Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

N: Industri Pengolahan Perikanan

R: Cold Storage/Cold Room

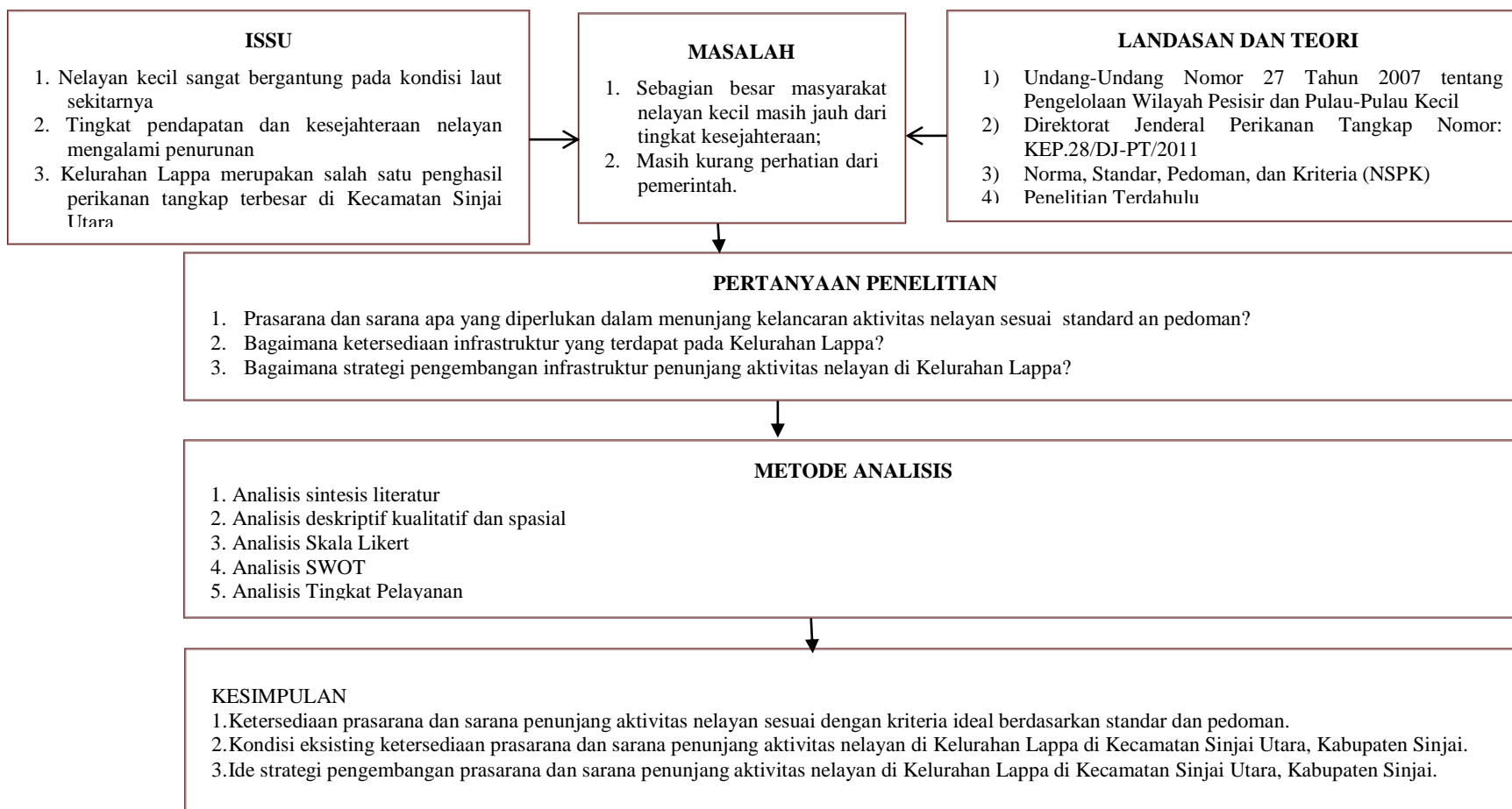
E: Sampah

J: Bank dan Koperasi

O: Docking Bengkel

H. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori, maka dirumuskan kerangka pikir yang diperlihatkan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Skema Alur Pikir Penelitian

Sumber: Penulis, 2022